

Kamis, 10 Februari 2011

Tolak Hitungan Berkedok Audit BPK dan BPKP

Werry Siap Mengugat

Pontianak, BERKAT.

Pernyataan Walikota Pontianak Sutarnidi, SH, M.Hum terkait proyek pipanisasi yang dikerjakan oleh PT Promits dengan halnya akan membayar Rp 2,2 Miliar hingga Rp 2,4 Miliar sesuai hasil audit BPK dan BPKP ditolak mentah-mentah oleh Site Manager PT. Promits yang juga pelaksananya dan pemodal Ir. H. Werry Syahrrial. Walikota yang berkilah bahwa jumlah

” Baguslah jika Walikota mau diperiksa Polda dan bertanggungjawab

WERRY SYAHRRIAL
Site Manager PT Promits



tersebut sudah diaudit BPK dan BPKP, menurut Werry BPK hanya menghitung

bukan mengaudit. Sebab kalau mengaudit, tentunya harus kedua pihak dihitung. Hasil hitungan BPKP progresnya 87,21%. Kemudian semua pihak sepakat 87,201 %, tanpa menghitung pekerjaan-pekerjaan lainnya.

Walikota di media massa menyatakan bertanggungjawab terhadap kisruhnya kasus pipanisasi PDAM Kota Pontianak dan mempertanyakan kenapa bukan dia yang diperiksa Polda. Hal itu menurut Werry, sangat bagus jika

Walikota mau diperiksa Polda dan siap bertanggungjawab.

”Walaupun aneh. Dalam hal kontraktual, yang bertanggung jawab tentulah yang berkontrak. Tiba-tiba Walikota nantang minta diperiksa dan menyatakan bertanggungjawab, justru saya bertanya ada apa? kok pasang badan?” ujar H. Werry, kepada wartawan, kemarin.

Werry pun menganggap bahwa hasil dari BPK dan BPKP tersebut bukan audit, tapi

LANJUTAN BACA HAL 11

Werry Siap Menggugatdari Hal 1

hanya perhitungan progres awal kerjasama yang disepakati, karena jika BPK dan BPKP mengaudit pekerjaan dari sisi PDAM, seharusnya pekerjaan yang dilakukan oleh PT Promits diaudit juga.

“Saya mempertanyakan audit itu, pasti itu berkenaan dengan kontrak perjanjian. Namun, jika pekerjaan itu diaudit BPK dan BPKP, kenapa yang diaudit hanya PDAM, saya juga minta diaudit BPKP, karena itu bukan hasil audit tetapi hitungan, tepatnya menghitung progres. Waktu itu progres yang kami ajukan sebesar 92%, dan PDAM menghitung sebesar 87,21%. Kita pun melakukan musyawarah karena untuk memecahkan masalah itu, makanya ada kesepakatan tentang progres yang disetujui bersama,” paparnya.

Ia menegaskan bahwa apa yang disebut audit oleh walikota itu tidak benar. Yang benar sesuai pengakuan BPKP di DPRD bahwa pihaknya dimintai PDAM menghitung progres.

“Jika BPKP mengaudit. Mana hasil auditnya? Apa isi auditnya. Sementara saya nyembah-nyembah minta diaudit juga tapi BPKP menolak dengan segala cara,” ungkapinya.

Namun, jika BPK dan BPKP memang mengaudit, pihaknya tidak segan-segan mengajukan tuntutan.

“Akan kita gugat. Siapa menyuruh audit, jika diaudit kenapa saya tidak diaudit. Pada waktu itu kami sepakat membayar progres sebesar 87,21%, itu kita sepakatlah. Itu saya setuju. Namun, ada hal lain yang harus dibayar dan itu diakui BPKP, yaitu pekerjaan-pekerjaan saya yang diluar perhitungan BPKP, total modal kerja saya senilai Rp 7 miliar setelah dipotong, tetapi mengapa dibayar Rp 2,2 Miliar. Tagihan yang lain mana, bayarlah. Mungkin walikota tidak tahu ada tagihan lain, tidak tahu jika pemotongan itu tidak benar, karena yang hendak dibayarkan kepada kami itu bukan Rp 2,2 Miliar tetapi Rp 1,4 Miliar setelah dipotong. Saya jelas menolak pembayaran tersebut dan itu makanya saya melaporkan hal itu ke Polda karena ada unsur penipuan dan penggelapan,” tegasnya.

Kekeraskepalaan PDAM dan Walikota akhirnya menyebabkan hingga saat ini proyek pipanisasi yang seharusnya tuntas akhir Desember 2009 lalu terbengkalai dan putus. Padahal, tahun ini juga masyarakat sudah bisa menikmati air bersih dari proyek tersebut.

“Bahkan bisa menikmati air dari kran langsung, belum lagi jalan rusak satu tahun bisa diperbaiki. Kami pelaksana siap melaksanakan itu tapi distop sepihak. Nah, yang bikin hancur Kota Pontianak itu siapa sebenarnya,” ucap mantan Ketua Aspekindo Kota Pontianak ini.

Pemerintah dan PDAM jika tidak mampu membayar apa yang sudah diklaim pihaknya senilai Rp 6,9 Miliar sebaiknya saran Werry mengaku saja dan meminta maaf akan kesalahan kepada PT Promits.

“Jika tidak mampu membayar, tidak masalah. Jumlah berapapun kami terima, bahkan Rp 1.000, tapi ngaku salah dulu. Namun, sampai sekarang PDAM tidak bisa membantah tuduhan bahwa mereka salah. Masalah ini sudah masuk ranah hukum, meskipun Polda belum menetapkan sebagai tersangka, tetapi sudah ada yang bertanggungjawab nampaknya, yaitu walikota. Seharusnya dari situ Polda agak gampang. Sudah ada yang bertanggungjawab. Walikota dengan gagah berani menyatakan bertanggungjawab. Baguslah. Namun, jika masalah izin pemeriksaan Walikota, saya bisa insya Allah seminggu untuk mendapatkannya dari Presiden. Jangan menganggap mentang-mentang walikota izinnya lama turun,” terangnya.

Dijelaskannya masalah ini tidak semudah apa yang dilihat karena ada hal mendasar mengapa pembayaran tidak dilakukan, yaitu proyek lanjutan yang otomatis diperoleh pihaknya. Namun terganjal oleh putusan sepihak tersebut.

“Ini ada latar belakangnya, yaitu proyek lain miliar rupiah, karena jika proyek ini tuntas, pastinya proyek lain senilai Rp 62 miliar otomatis ke saya. Namun, yang jelas saya mau masalah ini dituntaskan segera. Bayar dong sesuai yang saya tagih selain 87,201 % progres itu, juga tagihan lainnya senilai Rp 6,9 Miliar lebih itu, kok dipotong-potong. BPKP mengetahui memang ada pekerjaan lain yang tidak dimasukkan dalam progres 87,201 % tersebut,” katanya lagi.

Namun, jika walikota beralasan pihaknya enggan membayar sesuai apa yang diklaim PT Promits karena takut tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan BPK dan BPKP, Ketua Pengda Lembaga Karate Indonesia (Lemkari) Kalbar ini siap menggugat kedua lembaga tersebut, karena BPK maupun BPKP tidak berhak untuk memerintahkan pembayaran tersebut. Pihaknya pun meminta bukti pernyataan BPK dan BPKP akan perintah pembayaran itu.

“Kita akan gugat BPK dan BPKP jika mereka memerintahkan pembayaran, dan mana surat perintah bayar dari BPKP? Karena yang berhak untuk memerintahkan pembayaran tersebut adalah konsultan proyek dan kontraktor itu sendiri,” tegasnya.

Pihaknyapun siap membawa masalah ini hingga hukum yang lebih tinggi, karena jika walikota tetap tidak mau membayar sesuai dengan klaim PT Promits, ia memastikan nilai kerugian yang harus dibayar pemerintah bisa lebih besar jika masalah ini berujung ke pengadilan, dengan total Rp 22,69 Miliar, yang terdiri dari kerugian material dan immaterial.

“Jika masalah ini berlarut, saya akan menuntut terus, meskipun beberapa tahun mendatang saya akan tetap menuntut hingga hak kami dipenuhi, karena kami merasa dizholimi oleh penguasa. Walaupun semuanya sudah saya serahkan kepada Allah,” janjinya. (wti)